

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana Alam selama ini selalu dipandang sebagai sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan lokal daerah setempat, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah yang mempunyai resiko terhadap bencana.

Secara Geografis Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan termasuk tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, 10 kali lipat tingkat kegempannya dari pada di Amerika Serikat.

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu musim panas dan musim hujan, dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim, seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin

parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana *hidrometeorologi*, salah satu penyebabnya adalah karena adanya efek rumah kaca, bencana *hidrometeorologi* yaitu seperti halnya banjir, tanah longsor dan kekeringan yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia.

Sesuai undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana, yang secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pada tahun 2017 silam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saja telah tercatat bahwasanya telah terjadi bencana secara nasional sebanyak 2.341 bencana, seperti yang di unduh oleh web resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yakni : “Tahun 2017 segera berakhir. Bencana selalu menyertai setiap waktu di tahun 2017. Data sementara, tercatat 2.341 kejadian bencana selama tahun 2017. Rincian kejadian bencana tersebut terdiri dari banjir (787), puting beliung (716), tanah longsor (614), kebakaran hutan dan lahan (96), banjir dan tanah longsor (76), kekeringan (19), gempabumi (20), gelombang pasang dan abrasi (11), dan

letusan gunungapi (2). Sekitar 99 persen adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan”¹.

Dari data tersebut yang di keluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat kita ketahui bahwa potensi bencana tanah longsor sangat rawan dengan di buktikannya kejadian sebanyak 614 kali selama tahun 2017, yang mana bencana tanah longsor termasuk 3 besar bencana yang sering terjadi di Indonesia, setelah banjir dan puting beliung.

Selanjutnya, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan “Bencana longsor adalah bencana yang paling banyak menimbulkan korban jiwa. Tercatat 156 orang tewas, 168 jiwa luka-luka, 52.930 jiwa mengungsi dan menderita, dan 7 ribu lebih rumah rusak akibat longsor selama 2017. Sejak tahun 2014 hingga 2017, bencana longsor adalah bencana yang paling mematikan. Paling banyak menimbulkan korban jiwa meninggal dunia. Seringkali longsornya kecil namun menyebabkan satu keluarga meninggal dunia”².

Bahwasanya bencana tanah longsor merupakan bencana yang harus selalu di waspadai meskipun setiap bencana juga perlu di waspadai akan tetapi bencana tanah

¹ Nugroho Sutopo Purwo, www.bnpb.go.id, “2.341 Kejadian Bencana, 377 Tewas dan 3,5 juta Jiwa Menngungsi dan Menderita Akibat Bencana Tahun 2017”, Jum’at, 29 Desember 2017, 20:57 wib, di akses pada Rabu, 21 Maret 2018, 14:39 wib.

² Nugroho Sutopo Purwo, www.bnpb.go.id, “2.341 Kejadian Bencana, 377 Tewas dan 3,5 juta Jiwa Menngungsi dan Menderita Akibat Bencana Tahun 2017”, Jum’at, 29 Desember 2017, 20:57 wib, di akses pada Rabu, 21 Maret 2018, 14:39 wib.

longsor berbeda dengan bencana – bencana yang lain seperti banjir, karena dampak dari terjadinya tanah longsor lebih berbahaya, dari data tahun 2017 menyatakan bahwa dampak bencana terhadap masyarakat tertinggi adalah tanah longsor dan di lanjut dengan banjir seperti dalam data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) “Dampak banjir menyebabkan 135 orang tewas, 91 jiwa luka-luka, lebih dari 2,3 juta jiwa menderita dan mengungsi, dan ribuan rumah rusak. Puting beliung atau angin kencang juga terus mengalami peningkatan. Dari 716 kejadian puting beliung telah sebab 30 jiwa tewas, 199 jiwa luka, 14.901 jiwa mengungsi dan menderita, sekitar 15 ribu rumah rusak”³.

Maka dari itu Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota harus mengembangkan kebijakan, strategi dan operasi untuk menanggulangi bencana-bencana khususnya bencana tanah longsor sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional terutama daerah-daerah yang memiliki potensi terjadi bencana tanah longsor dengan frekuensi yang tinggi.

Menurut Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa “wilayah tengah dan selatan pulau jawa menjadi daerah yang paling terancam rawan tanah longsor, karena

³ Nugroho Sutopo Purwo, www.bnpb.go.id, “2.341 Kejadian Bencana, 377 Tewas dan 3,5 juta Jiwa Menngungsi dan Menderita Akibat Bencana Tahun 2017”, Jum’at, 29 Desember 2017, 20:57 wib, di akses pada Rabu, 21 Maret 2018, 14:39 wib.

daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki topografi pegunungan, perbukitan, dan lereng-lereng tebing yang di bawahnya terdapat banyak pemukiman”⁴.

Pada wilayah Jawa khususnya adalah wilayah Jawa Tengah ada beberapa daerah yang sangat berpotensi terjadi bencana tanah longsor seperti Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Purwokerto, Purworejo, Pekalongan, Temanggung, Semarang, Karanganyar, Tegal, Wonogiri, Magelang, Purbalingga, dan Boyolali⁵.

Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah dengan topografi pegunungan serta tanah yang subur, sehingga berpotensi tinggi terhadap tanaman dan pertanian di sekitar Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi selain terdapatnya potensi pertanian yang bagus Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah yang sangat rawan berpotensi terjadinya bencana khususnya bencana tanah longsor, seperti yang di terbitkan menurut *web* resmi DPRD Banjarnegara mengatakan bahwa “Banjarnegara memiliki 70 titik rawan bencana, khususnya di Zona Utara”⁶.

Kejadian bencana tanah longsor di Banjarnegara termasuk sangat memprihatinkan karena menelan banyak korban bencana, seperti orang yang

⁴ Alfarizi Moh Khory, www.nasionalitempo.co, “BNPB, Daerah Rawan Tanah Longsor Meluas di Jawa”, Jum’at, 09 Februari 2018, 07:18 wib. Diakses pada Rabu, 21 Maret 2018, 15:11 wib.

⁵ Alfarizi Moh Khory, www.nasionalitempo.co, “BNPB, Daerah Rawan Tanah Longsor Meluas di Jawa”, Jum’at, 09 Februari 2018, 07:18 wib. Diakses pada Rabu, 21 Maret 2018, 15:11 wib.

⁶ Red, dprd-banjarnegara.go.id, “Banjarnegara Terkepung Bencana”, diakses pada Rabu, 21 Maret 2018, 15.50 wib.

meninggal dunia, luka-luka, hilang tertimbun dan mengungsi, seperti dalam data yang telah diunggah oleh media CNN Indonesia bahwasanya sebelum terjadi bencana tanah longsor pada tahun 2014 yang mana termasuk ke dalam bencana tanah longsor di Banjarnegara yang parah, pada tahun 2006 Kabupaten Banjarnegara juga telah terjadi bencana tanah longsor, kejadian tersebut menimpa Dusun Gunungraja, Desa Sijeruk, Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara, yang menyebabkan 76 orang tewas, 44 jiwa hilang, 16 luka-luka, serta 587 jiwa mengungsi. tanah tersebut merupakan tanah dari bukit Telagalele. Selanjutnya pada tahun 2014 bencana tanah longsor juga terjadi lagi di Banjarnegara, kejadian tanah longsor pada tahun ini bisa di bilang sangat ekstrim karena hanya dalam waktu sekitar 5 menit saja tanah sudah menimbun masyarakat, serta rumah-rumah masyarakat. Namun pada tahun 2014 silam kejadian bencana tanah longsor terjadi di daerah Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Banjarnegara. Yang menyebabkan 56 orang tewas, puluhan rumah rusak, 108 jiwa tertimbun. Kejadian bencana tersebut juga terjadi karena longSORan tanah dari bukit Telagalele sama seperti halnya pada tahun 2006 silam.

Tidak hanya pada tahun 2006 dan tahun 2014 saja kejadian bencana tanah longsor tersebut di Banjarnegara, hampir setiap tahun tanah longsor terjadi di Banjarnegara, akan tetapi pada tahun-tahun yang lain kejadian bencana tersebut tidak separah yang terjadi pada tahun 2006 dan tahun 2014 yang memakan korban bencana sangat banyak. Selain itu, dampak yang terjadi karena bencana tanah longsor adalah terputusnya jalur atau jalan penghubung ke daerah lain, sehingga perlu bisa

menyebabkan kemacetan ataupun mencari jalur lain yang mana jalur alternatif biasanya akan lebih jauh dan memakan lebih banyak waktu para pengguna jalan.

Maka dari itu, dengan latar belakang banyaknya kejadian bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara karena topologi secara geografis Kabupaten Banjarnegara yang rawan longsor tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tersebut dengan Judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor”.



Tanah longsor tahun 2014



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat saya ambil perumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan disusunnya penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi pencegahan tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian dan skripsi dengan judul Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dalam Penanggulangan Pencegahan Tanah Longsor, sebagai berikut:

1. Untuk memberikan wawasan, informasi serta pengingat terhadap Pemerintah Daerah dan Dinas terkait, bahwasanya Kabupaten

Banjarnegara sangat berpotensi rawan terhadap bencana tanah longsor.

2. Memberikan informasi terhadap pejabat setempat seperti Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT setempat (terutama daerah yang rawan bencana) untuk selalu waspada terhadap bencana tanah longsor yang sewaktu-waktu terjadi
3. Memberikan informasi dan wawasan terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Banjarnegara terkait Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah yang rawan tanah longsor, sehingga masyarakat ikut membantu pemerintah daerah untuk menjaga lingkungan, serta mendukung kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

1.4 Kerangka Dasar Teori

a. Konsep Tentang Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan Publik, berasal dari tiga kata yaitu “Analisis”, “Kebijakan” dan “Publik”. Pertama, konsep analisis telah di definisikan salah satunya oleh E.S Quade (Alm), mendefinisikan bahwa “kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum, termasuk penggunaan *intuisi* (kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional atau

intelektual)⁷, sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) website resmi yang di kelola oleh Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) menjelaskan tentang analisis, bahwa “penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”⁸. Maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwasanya konsep analisis adalah Penguraian dan penelaahan untuk memperoleh pengertian yang tepat terhadap sesuatu arti secara *intelektual* atau *intuisi*.

Selain mendefinisikan tentang analisis, peneliti juga akan menjelaskan tentang arti “kebijakan”. definisi pertama kebijakan di ambil dari Alvin Nur Muhammad dalam skripsinya yang menggabungkan pendapat “*Lasswell & Kaplan*” dan “*Heinz Eulau & Kenneth Prewitt*” menyatakan bahwa “secara garis besar dapat di tarik pemahaman awal bahwa pengertian dari kebijakan adalah keputusan yang dilaksanakan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan”⁹, sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Budaya) menyatakan bahwa “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan

⁷ Dunn William N. “*Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, haL 95.

⁸ www.kbbi.kemdikud.go.id, “*analisis*”, 2016.

⁹ Muhammad Alvin Nur, “*Analisis Kebijakan Tata Ruang Kawasan Bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember Kaitannya Dengan Konsep Tata Ruang Tanggap Bencana*”, Skripsi, Universitas Jember, 2017, hal 6.

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan”¹⁰.

Di dalam bukunya William N. Dunn menyatakan bahwa “analisis kebijakan adalah salah satu diantara sejumlah banyak aktor lainnya di dalam sistem kebijakan. Suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh pola institusional dimana di dalamnya suatu kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik di antara tiga unsur, yaitu: kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan”¹¹.

Konsep ketiga dari analisis kebijakan publik adalah dari kata konsep “Publik”. Kata Publik merupakan perlawanan kata dari kata *private* (khusus), dalam hal ini publik digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama. meskipun peneliti tidak mengambil referensi kata Publik dari karya seseorang karena kata “Publik” merupakan kata yang umum dan sudah familiar dengan di masyarakat dengan artian Publik = umum.

Jadi, analisis kebijakan publik adalah sebuah penelaahan serta penguraian suatu keputusan secara *intelektual* atau *intuisi* yang di buat oleh

¹⁰ www.kbbi.kemdikud.go.id, “analisis”, 2016.

¹¹ Dunn William N. “*Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.

pemerintah atau organisasi yang mana bertujuan untuk kemaslahatan bersama atau kesejahteraan secara menyeluruh.

b. Konsep Tentang Pemerintah Daerah

Konsep tentang Pemerintah Daerah telah di atur di dalam undang-undang, seperti dalam undang-undang terbaru yaitu UU. No. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah terbagi ke dalam dua wilayah, yaitu Pemerintah Daerah wilayah Provinsi dan Pemerintah Daerah wilayah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah Provinsi di kepalai oleh seorang Gubernur sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di kepalai oleh Bupati/ Walikota, serta di bantu oleh Sekda (Sekertaris Daerah) dan/ atau Stakeholder dinas – dinas terkait.

c. Konsep Tentang Politik Lingkungan

Menurut *Blaikie & Brookfield*, 1987 dalam buku *Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, mendefinisikan bahwa

“Politik Lingkungan adalah sebagai suatu bingkai untuk memahami kompleksitas saling berhubungan antara masyarakat lokal, nasional, politik ekonomi global dan ekosistem”¹².

Sedangkan, menurut *Vayde*, 1983 ikut memberikan komentar mengenai apa itu politik lingkungan, menurut *vayde* yang dikutip oleh Herman Hidayat mngatakan bahwa “Politik Lingkungan adalah sama atas suatu metode terapan oleh ahli-ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang relevan, ini yang di kenal dengan sebutan *progressive contextualization*” (kontektualisasi yang maju)¹³, selanjutnya *Peluso* menambahkan keterangan dengan mengatakan bahwa “pendekatan ini juga bermaksud untuk menerangkan mengapa masyarakat menggunakan lingkungan dalam cara-cara yang khusus, kadang-kadang menyebabkan sumber daya berkurang atau rusak sehingga dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya¹⁴.

Setelah *Peluso* menambahkan tentang pendekatan tentang politik lingkungan, *Bryant & Bailey*, 1997:21-24 juga mengatakan tentang

¹² Hidayat Herman, “Politik Lingkungan, Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal 8.

¹³ Hidayat Herman, “Politik Lingkungan, Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal 8.

¹⁴ Hidayat Herman, “Politik Lingkungan, Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal 8.

pendekatan politik lingkungan bahwa “Ada banyak pendekatan untuk politik lingkungan yang terbagi menjadi 6 bagian, sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai masalah-masalah lingkungan yang khusus atau menunjukkan suatu masalah, misalnya kerusakan hutan tropis, banjir, erosi tanah, polusi sungai dan kerusakan mutu tanah (*deforestasi*).
2. Memfokuskan pada suatu konsep yang mengandung hubungan penting terhadap pertanyaan politik lingkungan.
3. Untuk menguji saling hubungan antara masalah-masalah politik dan lingkungan dalam hubungan kondisi geografis yang khusus, hal ini di hubungkan dengan sering munculnya masalah alam yang bervariasi.
4. Untuk menggali masalah politik lingkungan dalam hubungan karakteristik sosio-ekonomi seperti golongan, etnisitas atau gender.
5. Menekankan perlunya memfokuskan minat, karakteristik dan aksi dari tipe pelaku yang berbeda di dalam memahami konflik-konflik lingkungan.

6. Pendekatan dan bingkai konsep politik lingkungan menyebutkan dibawah ini ketika kita menguji dan mengidentifikasi gerakan para aktor (pelaku) dan kebijakan negara sebagai pelaku untuk pengelolaan hutan , ini tepat. Agar untuk menentukan sejauh mana setiap pelaku memberi kontribusi terhadap pengelolaan hutan di Indonesia, ini lebih baik untuk mendefinisikan siapa aktor (pelaku) yang langsung dan tidak langsung¹⁵.

Dari ke-6 pendekatan tersebut, peneliti lebih menekankan terhadap beberapa point saja yang sekiranya perlu terhadap penelitian skripsi ini, yaitu

1. Mengidentifikasi gerakan para aktor (pelaku) dan kebijakan negara (Pemerintah Kabupaten Banjarnegara) sebagai pelaku untuk pengelolaan hutan (pengelolaan lingkungan),
2. Menguji saling hubungan antara masalah politik dan lingkungan dalam hubungan geografis yang khusus, karena dalam hal ini dihubungkan dengan sering terjadinya masalah alam, seperti banjir, polusi, sungai, dan termasuk tanah longsor. yang mana peneliti akan lebih memfokuskan analisisnya terhadap kebijakan yang berkaitan dengan bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara.

¹⁵ Hidayat Herman, "Politik Lingkungan, Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi", Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal 8.

d. Konsep Tentang Bencana Alam

Secara *etimologis*, bencana berasal dari kata *Disaster* (*Dis* dan *Astro*), *dis* yang berarti sesuatu yang tidak enak (*unfavorable*) dan *astro* yang berarti bintang (*star*), jadi *Disaster* atau *dis-astro* berarti *an event precipitated by stars*. Dengan kata lain, merupakan peristiwa jatuhnya bintang-bintang ke bumi. Kemungkinan, pada zaman dahulu, jatuhnya bintang-bintang ke bumi di asumsikan sebagai malapetaka bagi kehidupan manusia di bumi¹⁶

Bencana alam menurut UU No. 24 tahun 2007 di definisikan sebagai berikut “Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dan dampak psikologis¹⁷.”

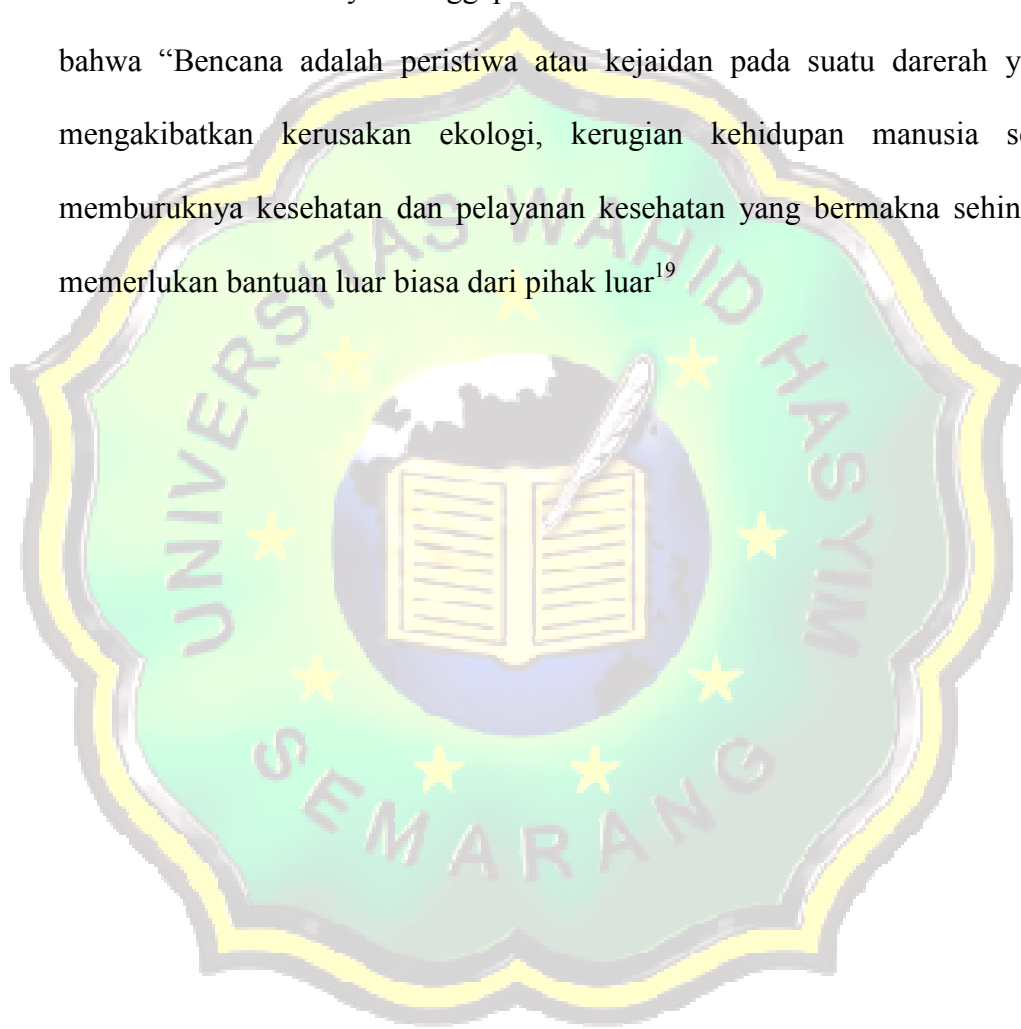
Menurut giri wiaro, dalam bukunya Tanggapan Darurat Bencana Alam, menjelaskan bahwa “Bencana Alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alam (suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia,

¹⁶ Anies, “*Negara Sejuta Bencana, identifikasi, analisis solusi mengatasi bencana dengan manajemen kebencanaan*”, AR-RUZZ MEDIA, Yogyakarta, 2017, hal. 31-32.

¹⁷ Republik Indonesia, 2007. “*Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana*”.

akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian¹⁸.

Sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI yang di kutip oleh Giri Wiarto dalam bukunya *Tanggap Darurat Bencana Alam* mendefinisikan bahwa “Bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar¹⁹”



¹⁸ Wiarto Giri, *“Tanggap Darurat Bencana Alam”*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2017 hal. 3.

¹⁹ Wiarto Giri, *“Tanggapan Darurat Bencana Alam”*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2017 hal. 4.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam hal apapun ketika kita akan melakukan suatu apapun kita harus merencanakan tindakan apa yang akan kita lakukan, serta dengan metode seperti apa akan kita lakukan hal tersebut, sehingga dalam melakukan penelitian ini peneliti juga menggunakan metode penelitian karena metode penelitian sangat membantu dan berarti bagi peneliti dalam melakukan analisis penelitian pada skripsi ini²⁰, yakni skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor” Untuk itulah sekiranya sangat perlu peneliti untuk memaparkan jenis-jenis dan pendekatan penelitian, sebagai berikut :

Adapun penulisan skripsi ini merupakan penelitian *mix research*, penelitian *mix research* adalah penelitian gabungan, yaitu gabungan antara *field research* dan *library research*, *field research* adalah penelitian di lapangan, berbeda dengan *library research* yaitu mengumpulkan data-data penelitian dari buku-buku, ensiklopedia, kamus, artikel maupun jurnal yang dipandang memiliki hubungan dengan tema dan judul penulisan skripsi ini²¹, sedangkan *field Research* yaitu pengumpulan data-data yang di lakukan terjun ke dalam lapangan secara langsung, termasuk dengan wawancara:

²⁰ Junaidi , “*Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Ghozali Tentang Etika Politik (Skripsi)*”, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2013.

²¹ Junaidi , “*Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Ghozali Tentang Etika Politik (Skripsi)*”, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2013.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif dari peneliti sendiri.

Adapun sumbernya berasal dari kebijakan pemerintah kabupaten banjarnegara, wawancara Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan wawancara dengan masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan dua sumber data. *Pertama*, Data Primer dan *kedua*, Data Sekunder. Data Primer adalah data-data yang bersifat mengikat²², adapun yang dimaksud dari data primer dalam pembuatan skripsi ini adalah berasal dari wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Banjarnegara dan PerBup (Peraturan Bupati). Sedangkan sumber Data Sekunder adalah data-data pelengkap atau penunjang sehingga dapat membantu peneliti untuk menambah informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun data tersebut berasal dari kejadian-kejadian di lapangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

²² Junaidi , “*Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Ghozali Tentang Etika Politik* (Skripsi)”, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2013.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini bersumber langsung dari data primer dan di lengkapi dengan data-data sekunder, dengan tehnik wawancara melalui daftar pertanyaan dan di tunjang dengan alat-alat pengumpul data, tehnik deskripsi, serta tehnik interpretasi sehingga setelah data di kumpulkan peneliti akan melakukan penganalisisan data²³.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu tehnik atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai (*informan*). Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik atau metode wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan unuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai²⁴.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan serta tersusun maka sebelum melakukan wawancara, pewawancara (peneliti)

²³ Narbuko Cholid & achmadi Abu, “*Metodologi Penelitian*”, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal. 164-165.

²⁴ Noor Juliansyah, “*Metodologi Penelitian*”, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015. hal 138.

meyusun pertanyaan-pertanyaan secara sistematis dan telah disiapkan sebelumnya. Hal ini penting dilakukan agar pertanyaan yang diajukan tetap sesuai koridor dan fokus terhadap informasi yang dibutuhkan pewawancara atau tujuan penelitian. Selain itu terdapat 1 hal yang sangat penting yang dilakukan pewawancara atau peneliti dalam berwawancara yakni mengenai intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata dan kepekaan nonverbal²⁵. hal ini sangat penting diperhatikan karena hal tersebut nantinya berkenaan dengan dapat diterimanya maksud atau isi dari pertanyaan yang kita ajukan serta menyangkut dengan jawaban atau informasi yang kita terima. Adapun narasumber atau informan yang menjadi sasaran wawancara yaitu: 1. Arif Rachman Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Banjarnegara, dan 2. Masyarakat sekitar yang mana daerah tersebut terkena tanah longsor yang mana hasil wawancara kedua narasumber tersebut di gunakan sebagai bahan dalam pembahasan skripsi ini yang di beri judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor”.

²⁵ Noor Juliansyah, Ibid, hal 139.

b. Deskripsi

Suatu bentuk wacana yang berusaha untuk melukiskan atau menggambarkan dengan kata-kata, wujud atau sifat lahiriah dari suatu obyek. Penelitian menggunakan metode ini tentang “Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor”.

c. Interpretasi

Melakukan pemahaman yang benar mengenai ekspresi manusia yang dipelajari. Dalam hal fakta atau produk itu dibaca sebagai suatu naskah²⁶. Peneliti melakukan interpretasi dari temuan hasil penelitian dengan maksud untuk menjelaskan hasil penelitian dengan interpretasi penulis, serta interpretasi tersebut peneliti kaitkan dengan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti.

Demikian penjelasan mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan dalam proses skripsi ini, sebagai bentuk pertanggung jawaban secara ilmiah dan akademik.

²⁶. Junaidi , “*Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Ghozali Tentang Etika Politik (Skripsi)*”, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2013.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sistematika penulisan skripsi ini, adapun skripsi ini penulis membagi menjadi 4 bagian atau 4 BAB :

Bab Pertama, yakni memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Dasar Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Gambaran Umum tentang Kabupaten Banjarnegara dan BPBD Banjarnegara

Bab Ketiga, Analisis Pokok Masalah yaitu memuat uraian pembahasan pokok masalah penelitian.

Bab Keempat, Penutup berisikan Kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari penelitian dan pembahasan untuk memperlihatkan intisari dari penjelasan analisa yang dilakukan oleh penulis. Saran merupakan dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis ditujukan pada para peneliti yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah penulis lakukan.